

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Pusat memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri, yang mana sering disebut dengan sistem Otonomi Daerah. Sistem Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan – urusan di bidang pemilihan pimpinan daerah, aparatur daerah, mengelola keuangan daerah, memungut pajak dan retribusi daerah, mendapat bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainya yang berada di daerahnya.

Seiring dengan semangat Otonomi Daerah dan dengan diberlakukanya Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan optimalisasi belanja yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya undang-undang tersebut masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam perencanaan anggaran pemerintah. Perangkat Pemerintah Daerah harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam perencanaan dan perumusan kebijakan strategis daerah, termasuk implementasi dan pengalokasian anggaran belanja daerah agar pelaksanaan berbagai kegiatan pelayanan oleh Pemerintah Daerah dapat berjalan efisien dan efektif.

Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Yang selanjutnya disingkat dengan RKA SKPD merupakan dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

Dalam APBD terdapat belanja daerah yang meliputi kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dipergunakan untuk rangka mendanai kegiatan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten dan Kota yang dilaksanakan secara bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Rancangan Kerja Anggaran dalam suatu Pemerintah Daerah merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam Pemerintah Daerah. Rencana kerja anggaran merupakan faktor penting yang harus dibahas secara matang dan penerapannya harus optimal. Proses dari penyusunan anggaran terjadi sebelum tahun rencana kerja anggaran atau saat periode tahun berjalan. Anggaran akan dijadikan pedoman untuk melakukan kegiatan Pemerintahan Daerah guna mencapai tujuan Pemerintah Daerah. Anggaran merupakan alat yang efektif bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan perencanaan dan pengendalian atas kegiatan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik membuat Tugas Akhir tentang “ **Prosedur Penyusunan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Pasaman Barat**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas , maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu bagaimana prosedur penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) pada badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah (bappelitbangda) kabupaten pasaman barat.

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulis adalah untuk mengetahui prosedur penyusunan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Pasaman Barat.

1.4 Manfaat Penulisan

Dengan adanya kegiatan magang ini maka manfaat yang diharapkan penulis adalah:

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang prosedur penyusunan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Pasaman Barat
2. Untuk memberikan pengalaman kerja bagi mahasiswa dalam keterampilan praktek.
3. Untuk membuat jaringan kegiatan dengan pegawai di instansi tempat aktivitas magang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan laporan ini terdiri dari lima bab yang setiap bab dibagi menjadi sub bab yang menjadi kesatuan kerangka pemahaman masalah dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum dari suatu masalah, pada bab ini terdiri dari enam sub bab yang meliputi : latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Merupakan bab yang berisi teori –teori dan konsep yang menjadi dasar pemikiran dalam penerapan sistem anggaran berbasis kinerja.

BAB III : GAMBARAN UMUM INSTANSI

Merupakan bab yang berisikan gambaran umum tentang BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasaman Barat, sejarah berdirinya, visi dan misi instansi terkait, struktur organisasi , uraian tugas dan fungsi masing –masing bidang dalam BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasaman Barat.

BAB IV : PEMBAHASAN

Merupakan bab yang menguraikan tentang “ Prosedur Penyusunan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasaman Barat.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari totalitas amatan serta setelah itu dilengkapi dengan saran – saran yang karakternya membuat, yang bermanfaat buat koreksi serta pergantian di era yang hendak tiba.

